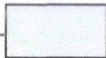
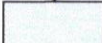
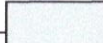
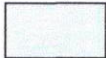
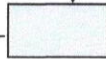


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 330.n/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN BMN	NAMA SOP	: PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 10. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		1. Pendidikan SMA/ sederajat 2. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa 3. Ditetapkan dengan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan SK Pemeriksa/ Penerima Barang 4. Bertanggung jawab atas pemeriksaan barang
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP Belanja Barang 2. SOP Aset Tetap 3. SOP Persediaan Barang		1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. DIPA 5. Dokumen rencana pengadaan Barang Jasa
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Pelaksanaan pembuatan dokumen pengadaan barang jasa harus sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku		1. Kontrak/ Surat Perintah Kerja 2. Dokumen Tender 3. Berita Acara Serat Terima Barang 4. HPS

SOP PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Meminta kepada seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menyusun kebutuhan barang dan jasa selama 1 tahun berjalan, lalu diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			pengajuan barang/jasa selama 1 tahun berjalan	3 hari	pengajuan barang/jasa selama 1 tahun berjalan	
2.	Menghimpun dan mengklasifikasi seluruh pengajuan barang/jasa, lalu disampaikan kepada PPK			pengajuan barang/jasa	1 hari	pengajuan barang/jasa	
3.	Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai data perkiraan kebutuhan.			perencanaan pengadaan barang/jasa	1 hari	perencanaan pengadaan barang/jasa	
4.	Menetapkan paket-paket pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, lalu diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			paket-paket pengadaan barang/ jasa	1 hari	paket-paket pengadaan barang/ jasa	
5.	Menyusun dokumen pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan, hasilnya diserahkan kepada PPK untuk ditetapkan dan disahkan			dokumen pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan	3 hari	dokumen pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan	
6.	Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang dan jasa			dokumen pengadaan barang dan jasa	1 jam	dokumen pengadaan barang dan jasa	